

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Usaha yang menjadi kegiatan ekonomi untuk kebanyakan masyarakat Indonesia ialah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Keberadaan usaha tersebut punya pengaruh serta berkontribusi cukup besar dalam mendorong perekonomian Indonesia. Selain itu, UMKM juga dianggap sebagai salah satu komponen dalam memperkuat perekonomian nasional karena UMKM memiliki karakteristik yang kuat, dinamis, dan efisien.

UMKM saat ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian negara, dilihat dari kedudukan UMKM yaitu sebagai pelopor di bidang ekonomi dengan bermacam sektor usaha. Dalam mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi serta memberdayakan masyarakat, UMKM berperan dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta mampu menciptakan pasar ekonomi yang baru. Bahkan dalam kegiatan perdagangan ke luar negeri, UMKM sudah mampu untuk menjaga neraca pembayaran.

UMKM di Indonesia memiliki perkembangan cukup signifikan mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Pada 2016, UMKM di Indonesia sudah berjumlah 61,6 juta unit serta tahun 2018 sudah mencapai 64,2 juta unit. Tahun 2018, sudah terjadi peningkatan jumlah UMKM sebesar 1.271.440 unit atau sekitar 2,02 % dari jumlah tahun sebelumnya yaitu 2017 yang mencapai 62,1 juta unit (www.depkop.go.id).

Kompetisi dalam usaha semakin meningkat seiring dengan semakin pesatnya perkembangan UMKM. Dengan semakin pesatnya kompetisi tersebut, laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan menjelaskan bahwa jumlah pengeluaran dalam proses produksi usaha cenderung memiliki jumlah yang sama dengan pendapatan yang diterima perusahaan. Dengan keadaan tersebut, usaha dengan kategori industri kecil apabila tidak mampu bersaing dengan usaha lainnya akan kalah dalam persaingan. Menurut Zhang dan Ye (2010) menjelaskan bahwa untuk dapat menjalankan kegiatan organisasi maupun dalam mempertimbangkan melakukan persaingan secara global, UMKM harus mampu melakukan pengelolaan keuangan secara efektif sebagai tantangan terbesar yang dihadapi oleh UMKM.

Selain itu, pelaku UMKM sulit dalam berkembang saat ini karena sering sekali menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Menurut Putri, *et al.* (2015), setidaknya ada beberapa masalah UMKM yang sering dihadapi. Masalah pertama yaitu tentang kesulitan pelaku UMKM dalam membuat dan memahami pencatatan akuntansi sehingga membuat UMKM tidak mampu dalam menghasilkan laporan keuangan sesuai standar yang diberlakukan untuk UMKM. Masalah selanjutnya yaitu masalah permodalan, ini karena kurangnya kepercayaan lembaga keuangan maupun lembaga non-keuangan kepada pihak UMKM dalam pengambilan kredit karena informasi keuangan dianggap kurang reliabilitas. Masalah lainnya terkait dengan kemajuan teknologi yang belum mampu dikuasai secara maksimal oleh pelaku UMKM. Permasalahan yang terakhir adalah kurangnya kemampuan pelaku UMKM dalam memasarkan produk atau jasanya sehingga sulit bersaing dan berkembang karena hal tersebut.

Untuk bisa mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan, mempermudah perhitungan pajak, mengetahui kinerja serta aliran kas untuk pemakai laporan keuangan dalam menentukan berbagai keputusan ekonomi dan mampu menjalankan kegiatan operasional berdasarkan penggunaan sumber daya yang dapat dipertanggungjawabkan, pelaku UMKM diharapkan sudah menghasilkan laporan keuangan sehingga mampu menggunakan informasi tersebut dalam menganalisis kinerja usahanya. Pelaku UMKM juga dapat memutuskan untuk mengembangkan pasar dan pengembangan harga dengan melihat laporan keuangan. Selain itu, UMKM akan membutuhkan akses permodalan kepada pihak di luar perusahaan seperti bank ataupun lembaga keuangan lainnya karena perkembangan usahanya memerlukan modal yang lebih dari sebelumnya. Hal tersebut akan dirasa sulit apabila pelaku UMKM belum mempunyai laporan keuangan yang biasanya menjadi syarat dalam pengajuan pinjaman ke lembaga keuangan seperti bank dan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, untuk bisa memajukan dan menjadikan UMKM lebih mandiri, maka disahkan *Exposure Draft* Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (ED SAK EMKM) oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI yang dilaksanakan rapat 18 Mei 2016. Standar tersebut kemudian 24 Oktober 2016 disebut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang kemudian 1 Januari 2018 diberlakukan secara efektif. Standar tersebut adalah penyederhanaan dari standar sebelumnya dianggap masih sulit untuk diterapkan oleh UMKM ialah Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Penyederhanaan SAK ETAP menjadi SAK EMKM diharapkan mampu menyadarkan UMKM agar

mampu mengimplementasikan standar tersebut sehingga tercapai tujuan dari SAK EMKM untuk standarisasi laporan keuangan pada UMKM.

Diterbitkannya SAK EMKM dapat dijadikan sebagai pendorong literasi keuangan bagi pelaku UMKM sehingga UMKM mampu mendapatkan modal dari pihak perbankan dengan akses yang lebih luas. Selanjutnya, dalam menyusun laporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih mudah oleh pelaku UMKM dengan SAK EMKM sehingga mampu digunakan dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, dengan penerbitan SAK EMKM diharapkan sudah diimplementasikan secara optimal oleh UMKM. Namun, di Indonesia standar tersebut belum dapat diimplementasikan secara optimal karena pelaku UMKM masih banyak yang belum mengetahui tentang SAK EMKM. Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang belum mengimplementasikan SAK EMKM.

Provinsi Bali adalah Provinsi dengan 9 Kabupaten dan Kota yang luas wilayahnya mencapai 0,29% dari luas wilayah Indonesia atau sekitar 5.636,66 km. Jumlah UKM di Provinsi Bali berdasar pada data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali pada 2017 sampai dengan 2018 meningkat sebanyak 13.042 unit atau sebesar 4% dari 312.967 unit menjadi 326.009 unit. Penyebaran UKM tersebut menyeluruh ke wilayah Kabupaten dan Kota di Bali termasuk Kabupaten Buleleng. Menurut Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, berbagai industri seperti kerajinan, kuliner dan busana sangat mendominasi UMKM yang ada di Bali (www.depkop.go.id).

Dilihat dari tabel 1, UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami perkembangan yang dapat dikatakan cukup pesat dari tahun 2017-2019. Jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng yang terdaftar maupun yang belum terdaftar pada

tahun 2017 sampai dengan 2019 terus meningkat. Pada tahun 2017 jumlah UMKM sebanyak 32.890 unit UMKM, pada tahun 2018 sebanyak 34.535 unit UMKM, sedangkan pada tahun 2019 jumlah UMKM sebanyak 35.538 unit.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah UMKM Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2019
(dalam unit)

NO	KLASIFIKASI USAHA	JUMLAH UMKM		
		2017	2018	2019
1	Usaha Mikro	24.243	25.202	26.048
2	Usaha Kecil	8.454	9.140	9.294
3	Usaha Menengah	193	193	196
	TOTAL	32.890	34.535	35.538

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng (2020)

Dinas Koperasi dan UKM Buleleng mendapatkan anggaran yaitu sebesar Rp 3,1 miliar untuk memberdayakan UKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng pada 2019 sudah mencapai 35 ribu unit, yang mana baru sekitar 8 ribu unit yang berizin. Namun, anggaran yang diberikan kepada dinas tersebut masih dianggap minim, sehingga pembinaan UKM di Buleleng terancam tidak dilakukan dengan maksimal (radarbali.jawapos.com).

Menurut Cahyaningtyas (2019) peningkatan UMKM di Kabupaten Buleleng tidak diiringi dengan meningkatnya pemahaman pelaku UMKM untuk mengimplementasikan SAK EMKM yang dianjurkan oleh DSAK IAI. Namun pada kenyataannya, bagi sejumlah UMKM masih menganggap SAK EMKM memberatkan mereka sehingga masih sangat rendah tingkat kebutuhan UMKM terhadap SAK EMKM. Secara umum, beberapa penyebab UMKM di Kabupaten Buleleng jarang mengimplementasikan SAK EMKM untuk penyusunan laporan

keuangan, diantaranya UMKM di Buleleng mayoritas belum menyadari pentingnya pencatatan keuangan usahanya. Padahal dengan adanya pencatatan keuangan, seperti pembukuan mengenai kegiatan operasional usaha, pelaku UMKM di Buleleng akan dapat melihat perkembangan usahanya apakah mengalami keuntungan atau kerugian sehingga mampu menentukan sehat atau tidaknya usaha yang dijalankan.

Di era yang serba digital, pelaku UMKM mayoritas masih buta terhadap akuntansi. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar pelaku UMKM menganggap bahwa sangatlah rumit menyusun laporan keuangan berdasar atas standar yang berlaku, sehingga masih banyak UMKM membuat pencatatan keuangan hanya sebatas pembukuan tentang pemasukan dan pengeluaran uang yang berkaitan dengan kegiatan usaha (www.ekonomi.kompas.com).

Menurut Grey, *et al.* (1994) menyatakan bahwa keberlangsungan hidup suatu perusahaan bergantung atas dukungan dari *stakeholder* ataupun pihak lainnya sehingga perusahaan harus mencarinya. Teori *stakeholder* juga menjelaskan bahwa suatu entitas beroperasi tidak untuk dirinya sendiri melainkan harus mampu memberi manfaat bagi para *stakeholder*.

Keberadaan *stakeholder* akan memberikan peran penting bagi UMKM, yang dimaksud *stakeholder* dalam hal ini adalah karyawan, pelanggan, pemerintah dan juga kreditor yaitu pihak bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Hal tersebutlah yang memiliki kaitan dengan sumber ekonomi yang diberikan oleh *stakeholder* bagi kegiatan operasional perusahaan yang dapat berupa pinjaman, masukan atau saran kepada perusahaan, ataupun kebijakan dari pemerintah setempat. Berdasar pada hal tersebut, peningkatan kinerja harus dilakukan perusahaan serta

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta mampu memberikan informasi akuntansi bagi para *stakeholder*. Laporan keuangan yang berkualitas dapat diperoleh apabila pelaku UMKM mampu mengimplementasikan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangannya.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi implementasi SAK EMKM pada UMKM untuk menyusun laporan keuangan, salah satunya yaitu sosialisasi SAK EMKM. Menurut Janrosl (2018) yang diartikan sebagai sosialisasi SAK EMKM adalah proses dalam belajar untuk bisa mengkoordinasikan antar perilaku serta belajar untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan yaitu SAK EMKM. Kebijakan SAK EMKM telah disahkan ini diperlukan sosialisasi dari pemerintah melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng, karena akan mampu memberikan pemahaman yang baik tentang standar tersebut bagi UMKM.

Penelitian oleh Kusuma dan Lutfiany (2018) menunjukkan implementasi SAK EMKM dipengaruhi secara positif oleh sosialisasi SAK EMKM. Penelitian Nurdwijayanti dan Sulastiningsih (2018) dan Dewi (2017) menunjukkan bahwa secara parsial implementasi SAK ETAP pada UMKM dipengaruhi positif dan signifikan oleh sosialisasi SAK ETAP. Hal ini didukung penelitian Badria dan Diana (2018) yang menunjukkan bahwa penggunaan SAK EMKM dipengaruhi secara signifikan oleh sosialisasi SAK EMKM. Namun hal tersebut kurang sesuai dengan hasil penelitian Febriyanti dan Wardhani (2018) menyimpulkan bahwa penerapan SAK EMKM tidak dipengaruhi secara positif oleh sosialisasi. Di Kabupaten Buleleng, masih jarang adanya sosialisasi terkait SAK EMKM oleh

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, UKM kepada para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng secara keseluruhan.

Hasil penelitian Kusuma dan Lutfiany (2018) menyatakan bahwa UMKM dapat melakukan pinjaman modal ke lembaga keuangan dengan mudah apabila laporan keuangan yang dibuat reliabel. Maka dari itu, sosialisasi dianggap penting agar pemilik atau manajer UMKM mempunyai pengetahuan yang baik untuk menyusun laporan keuangan serta termotivasi agar kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat ditingkatkan. Inkonsistensi hasil penelitian tentang implementasi SAK EMKM dengan sosialisasi SAK EMKM menjadi dasar dilakukannya penelitian kembali pada UMKM di Kabupaten Buleleng terkait implementasi SAK EMKM yang dipengaruhi oleh sosialisasi SAK EMKM.

Dalam mengimplementasikan SAK EMKM dipengaruhi juga oleh pemahaman akuntansi. Dalam menyusun laporan keuangan, pemahaman akuntansi juga diperlukan sebagai dasar dalam memahami untuk mengimplementasikan SAK EMKM. Menurut Winkel (2004: 274) suatu pemahaman merupakan kemampuan dalam memahami sesuatu yang dipelajari baik arti maupun maknanya. Penelitian Lohanda (2017) menjelaskan berdasarkan SAK ETAP, pelaporan keuangan dipengaruhi secara positif oleh pemahaman akuntansi. Selain itu, hasil penelitian Pardita (2019) menyatakan bahwa penerapan SAK EMKM dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh tingkat pemahaman akuntansi. Oleh sebab itu, dengan pemahaman akuntansi pelaku UMKM yang baik, maka kemampuannya akan semakin baik dalam penyusunan laporan keuangan dengan mengimplementasikan SAK EMKM.

Hal tersebut kurang sesuai dengan hasil penelitian Meidiyustiani (2016) karena penerapan SAK ETAP tidak dipengaruhi secara signifikan oleh pemahaman akuntansi. Inkonsistensi hasil penelitian tentang implementasi SAK EMKM dengan pemahaman akuntansi menjadi dasar dilakukannya penelitian kembali pada UMKM di Kabupaten Buleleng terkait implementasi SAK EMKM yang dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi.

Faktor lain yang juga menyebabkan belum diimplementasikan SAK EMKM adalah tingkat kesiapan pelaku UMKM tersebut. Menurut Pulungan (2019) kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu berdasarkan situasi serta kondisi dimaksud kesiapan. Kesiapan yang dimaksud dalam hal ini adalah kondisi yang membuat siap dalam menyusun laporan keuangan dengan mengimplementasikan SAK EMKM. Penelitian Rafiqa (2018) menjelaskan bahwa besar kecilnya omzet yang diterima mempengaruhi persepsi pelaku UMKM dalam mengimplementasikan SAK EMKM. Apabila semakin kecil omzet diterima perusahaan, sehingga tingkat kesiapan pelaku UMKM untuk mengimplementasikan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan semakin rendah pula karena masih adanya pendapat bahwa pencatatan keuangan itu rumit serta tidak memiliki pengaruh terhadap usaha mereka.

Pardita (2019) menjelaskan bahwa penerapan SAK EMKM dipengaruhi secara positif oleh tingkat kesiapan pelaku UMKM. Ini berarti, entitas dapat dikatakan relatif tidak siap mengimplementasikan SAK EMKM apabila entitas tersebut tidak mengetahui terkait ketentuan ataupun aspek dalam SAK EMKM. Begitu pula sebaliknya, pelaku UMKM dikatakan siap dalam

mengimplementasikan SAK EMKM apabila sudah mengetahui tentang SAK EMKM.

Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng merupakan sasaran yang dituju dalam penelitian ini, karena usaha ini jika dibanding skala usaha mikro ataupun kecil sudah memiliki tempat usaha, diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan serta diwajibkan untuk membayar pajak. Dalam hal ini, UMKM dalam skala menengah sudah terdaftar serta memiliki legalitas dan izin yang resmi sehingga sudah pasti membuat laporan keuangan karena jumlah omzet yang dikelola juga cukup besar, seperti UMKM di bidang perdagangan, industri maupun aneka jasa. Selain itu, penelitian yang berfokus pada pelaku Usaha Menengah di Kabupaten Buleleng masih jarang ditemukan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, bahwa saat ini mayoritas pelaku Usaha Menengah masih menyusun laporan keuangan secara sederhana berdasarkan pemahaman pemilik tentang akuntansi yang tidak berpedoman dengan standar akuntansi yang diberlakukan. Hal tersebut membuat pelaku usaha kesulitan dalam hal pengajuan kredit dalam hal permodalan serta perhitungan pajak, sehingga kesulitan dalam mengembangkan produk-produk untuk dapat bersaing dengan usaha besar.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Kusuma dan Lutfiany (2018), Nurdwijayanti dan Sulastiningsih (2018), Dewi (2017), Badria dan Diana (2018), Lohanda (2017), Pardita (2019) ialah terletak pada variabel yang diteliti. Kusuma dan Lutfiany (2018), Badria dan Diana (2018), Nurdwijayanti dan Sulastiningsih (2018), Dewi (2017) meneliti tentang bagaimana implementasi dipengaruhi oleh sosialisasi SAK EMKM. Kusuma dan Lutfiany (2018), Lohanda (2017), Pardita

(2019) meneliti tentang pengaruh pemahaman akuntansi terhadap implementasi SAK EMKM. Pardita (2019) meneliti tentang pengaruh tingkat kesiapan pelaku UMKM terhadap penerapan SAK EMKM.

Perbedaannya daripada penelitian-penelitian sebelumnya ialah: pertama, ada penambahan variabel tingkat kesiapan pelaku UMKM pada penelitian ini, karena penelitian terkait pengaruh tingkat kesiapan pelaku UMKM terhadap implementasi SAK EMKM masih sedikit diteliti sebelumnya. Kedua, perbedaan lokasi dan subjek yang diteliti, penelitian sebelumnya meneliti tentang implementasi SAK EMKM pada UMKM secara keseluruhan, sedangkan dalam penelitian ini fokus meneliti Usaha dalam skala Menengah. Ketiga, terkait dengan perbedaan variabel-variabel independen yang diteliti antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Sosialisasi SAK EMKM, Pemahaman Akuntansi, dan Tingkat Kesiapan Pelaku UMKM Terhadap Implementasi SAK EMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM di Kabupaten Buleleng"**

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Pelaku UMKM mayoritas belum menyusun laporan keuangan berdasar Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Beberapa UMKM yang belum membuat laporan keuangan sudah mempunyai pencatatan keuangan sederhana dan tidak sistematis.

Hal ini terjadi karena adanya anggapan pelaku UMKM terkait sulitnya menerapkan laporan keuangan serta menganggap proses akuntansi yang rumit sehingga dianggap kurang penting bagi UMKM dalam menjalankan usahanya.

2. Pelaku UMKM mayoritas belum pernah mendapatkan sosialisasi ataupun pelatihan terkait dengan standar akuntansi yang baru yakni SAK EMKM sehingga pelaku UMKM masih kurang mengetahui dan paham dengan SAK EMKM tersebut.
3. Pemahaman UMKM tentang akuntansi masih rendah, sehingga banyaknya UMKM yang tidak menyelenggarakan catatan akuntansi dengan baik, beberapa yang mempunyai catatan keuangan berupa pembukuan yang masih sederhana sesuai pemahaman yang dimiliki serta tidak sesuai dengan standar yang berlaku.
4. Tingkat kesiapan pelaku UMKM terhadap pencatatan akuntansi secara baik dan benar masih rendah, karena dianggap tidak begitu penting bagi perkembangan usahanya.

1.3 PEMBATAAN MASALAH

Peneliti memberi batas masalah yang diteliti menggunakan empat variabel, yaitu Sosialisasi SAK EMKM, Pemahaman Akuntansi, Tingkat Kesiapan Pelaku UMKM, dan Implementasi SAK EMKM. Penelitian ini dilaksanakan pada pelaku UMKM khususnya Usaha Menengah yang berada di Kabupaten Buleleng.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, meliputi:

1. Apakah sosialisasi SAK EMKM berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kabupaten Buleleng?
3. Apakah tingkat kesiapan pelaku UMKM berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kabupaten Buleleng?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Berdasar pada rumusan masalah yang dimaksud dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi SAK EMKM terhadap implementasi SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi terhadap implementasi SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kabupaten Buleleng.
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kesiapan pelaku UMKM terhadap implementasi SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kabupaten Buleleng.

1.6 MANFAAT HASIL PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Harapannya, penelitian ini menambah pengetahuan serta pemahaman lebih mendalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi implementasi SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan kesempatan menambah wawasan, serta memperluas pengetahuan, baik pengetahuan teori, maupun praktek. Selain itu, diharapkan dapat menambah pemahaman tentang SAK EMKM dan dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya.

b. Bagi Pelaku UMKM

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pelaku UMKM sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan menerapkan pencatatan akuntansi secara baik dan benar berdasar pada standar yang berlaku, yaitu SAK EMKM.

c. Bagi Pemerintah

Mampu memberikan informasi kepada pemerintah tentang bagaimana pentingnya penerapan akuntansi pada pelaku UMKM, sehingga pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan pembinaan untuk pelaku UMKM.

d. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Dapat dijadikan bahan referensi dan bacaan yang bisa dijadikan pedoman pada perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha.

e. Bagi Masyarakat

Dapat memberi informasi ke masyarakat bagaimana pentingnya penerapan akuntansi dalam segala bidang usaha terutama dalam bidang UMKM.

